

BAB 5

KESIMPULAN

Sebagai kebijakan yang dirancang dan dijalankan oleh negara, WHV merepresentasikan wajah baru diplomasi publik yang tidak lagi semata-mata bergerak di level hubungan antarpemerintah, tetapi justru membuka ruang keterlibatan langsung masyarakat sebagai aktor penting. Dalam skema ini, pemerintah Australia mengambil posisi sebagai pembuat sekaligus pendukung melalui penyediaan dasar hukum, pengaturan kuota, serta mekanisme perlindungan tenaga kerja. Di sisi lain, publik internasional, khususnya dari Indonesia, tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif sebagai pelaku diplomasi di ranah sosial sehari-hari. Peran negara tetap terasa kuat melalui keterlibatan lembaga seperti Department of Home Affairs, DFAT, serta KBRI dan KJRI yang berfungsi memfasilitasi, melindungi, dan mengoordinasikan partisipasi warga negara Indonesia dalam program WHV. Sejalan dengan pemikiran Joseph Nye dan Jan Melissen, kondisi ini menunjukkan bahwa diplomasi publik tetap membutuhkan dukungan negara agar dapat berjalan konsisten, sehingga efektivitas WHV sangat bergantung pada regulasi dan fasilitas yang membuat partisipasi publik berlangsung aman dan terarah.

Efektivitas WHV sebagai sarana *soft power* juga dapat dilihat dari cara publik kedua negara saling memandang, yang tampak berkorelasi dengan meningkatnya jumlah pengajuan visa dari Indonesia. Pandangan tersebut diperkuat oleh sejumlah indeks kesejahteraan global yang menempatkan Australia pada posisi lebih tinggi, sehingga WHV dianggap sebagai pilihan masuk akal untuk memperbaiki kondisi hidup sekaligus menambah pengalaman personal. Sebaliknya, persepsi masyarakat Australia terhadap Indonesia setelah pandemi COVID-19 memang menunjukkan perbaikan, tetapi lajunya relatif lambat dan masih dibatasi oleh minimnya pengetahuan serta prasangka struktural, sebagaimana pernah disoroti oleh Profesor David Reeve. Situasi ini mengindikasikan bahwa meningkatnya partisipasi WHV lebih banyak didorong oleh daya tarik Australia sebagai tujuan, bukan oleh kedalaman citra positif Indonesia di mata publik Australia.

Dilihat dari pelaksanaannya, WHV memberikan dampak ekonomi yang cukup nyata bagi Australia, mulai dari pemenuhan kebutuhan tenaga kerja hingga peningkatan konsumsi domestik, termasuk pemasukan dari biaya visa dan pajak penghasilan. Selama periode 2021-2024, data menunjukkan bahwa ekonomi Australia bergerak menuju pemulihan dan pertumbuhan yang relatif stabil, dengan migrasi sementara seperti WHV menjadi salah satu penopang penting sektor pertanian, pariwisata, dan jasa di wilayah regional. Kehadiran peserta WHV membantu menjaga operasional sektor-sektor padat karya yang sulit dipenuhi oleh tenaga kerja lokal, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah-daerah nonperkotaan. Namun, manfaat ekonomi ini tidak terdistribusi secara seimbang karena keuntungan yang lebih besar dirasakan oleh Australia, sementara Indonesia masih menghadapi defisit perdagangan dalam kerangka IA-CEPA yang implementasinya belum sepenuhnya optimal. Temuan-temuan tersebut menempatkan WHV sebagai kebijakan yang tidak hanya menguntungkan Australia secara ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi *soft power*-nya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Work and Holiday Visa* (WHV) efektif digunakan sebagai instrumen *soft power* dan diplomasi publik Australia terhadap Indonesia, terutama dalam membangun relasi *people-to-people* dan membentuk citra positif Australia di kalangan generasi muda Indonesia. Efektivitas ini tercermin dari meningkatnya partisipasi publik, keberlanjutan kebijakan, serta kontribusi ekonomi yang konsisten bagi Australia sepanjang 2021-2024. Meski demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan persepsi positif masyarakat Australia terhadap Indonesia, yang perkembangannya masih lebih lambat dibandingkan dinamika kebijakan antar pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa diplomasi publik tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan negara, melainkan membutuhkan penguatan institusi pengetahuan, pendidikan, media, dan interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus. Oleh karena itu, WHV dapat dipahami sebagai instrumen yang efektif secara implementasi, tetapi tetap memerlukan penguatan strategis agar hubungan Australia-Indonesia tidak sekadar stabil di level struktural, melainkan juga benar-benar mengakar secara sosial.